



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG

PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI BAGI BUPATI,  
WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa belanja Pegawai merupakan belanja wajib daerah yang harus dibayarkan tepat waktu;
- b. bahwa pembayaran belanja Pegawai Bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan mengingat pelaksanaan anggaran sesuai perangkat daerah baru belum efektif, perlu ditetapkan pengaturan penatausahaan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo bulan Januari Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pembayaran Belanja Pegawai bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja Pegawai.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini merupakan penatausahaan pembayaran gaji Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan PNS Kabupaten Sukoharjo Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.

## BAB III PEMBEBANAN ANGGARAN

### Pasal 3

Belanja pegawai bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan PNS Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 dibebankan pada APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada DPA Belanja Tidak Langsung masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB IV PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017

### Bagian Kesatu

- Pelaksana Penatausahaan Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Januari Tahun Anggaran 2017

### Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebelum dilantiknya Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat penandatanganan DPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

- c. Pejabat penandatanganan SPD Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Bendahara Pengeluaran penandatanganan SPP Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. PPK yang menyiapkan SPP Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Pejabat penandatanganan SPM Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Pejabat penandatanganan SP2D Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penerbitan SPD

Pasal 6

- (1) PPKD selaku BUD menerbitkan SPD Gaji bulan Januari Tahun Anggaran 2017.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah pada Format SPD Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Bagian Ketiga  
Pengajuan SPP-Gaji

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 kepada Pengguna Anggaran/Pejabat penandatanganan SPM Gaji melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah pada Format SPP Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar gaji pegawai.



Bagian Keempat  
Pengajuan SPM-Gaji

Pasal 8

- (1) Setelah dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/pejabat penandatanganan SPM Gaji menerbitkan SPM Gaji.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah pada Format SPM Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 10

- (1) Proses penelitian dan penerbitan SP2D Gaji oleh BUD atau Kuasa BUD dilaksanakan sesuai penatausahaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pelaksanaan APBD.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah pada Format SP2D Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Belanja Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017 selanjutnya akan dilakukan penyesuaian pencatatan laporan keuangan sesuai dengan komposisi jumlah pegawai masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA  
PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN  
JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
KABUPATEN SUKOHARJO

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENYEDIAAN DANA GAJI  
BULAN JANUARI TAHUN 2017

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD	Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Gaji Bulan Januari Tahun 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA  
PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN  
JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
KABUPATEN SUKOHARJO

BENDAHARA PENGELUARAN PENANDATANGAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPP GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Perencana Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Dinas Perhubungan
7	Badan Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Sosial	Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPP GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
23	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran Pada Inspektorat	Inspektorat
24	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Weru	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Weru	Kecamatan Weru
26	Kecamatan Bulu	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu
27	Kecamatan Tawangsari	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Tawangsari	Kecamatan Tawangsari
28	Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
29	Kecamatan Nguter	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Nguter	Kecamatan Nguter
30	Kecamatan Bendosari	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bendosari	Kecamatan Bendosari
31	Kecamatan Polokarto	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Polokarto	Kecamatan Polokarto

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPP GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
32	Kecamatan Mojolaban	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Mojolaban	Kecamatan Mojolaban
33	Kecamatan Grogol	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Grogol	Kecamatan Grogol
34	Kecamatan Baki	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Baki	Kecamatan Baki
35	Kecamatan Gatak	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Gatak	Kecamatan Gatak
36	Kecamatan Kartasura	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
37	Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
38	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
39	Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Bendosari	Kecamatan Bendosari
40	Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
41	Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
42	Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
43	Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
44	Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
45	Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
46	Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
47	Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
48	Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPP GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
49	Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
50	Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
51	Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
52	Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
53	Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo	Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
54	Badan Ketahanan Pangan	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
55	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
56	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
57	Dinas Pertanian	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA  
 PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN  
 JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
 KABUPATEN SUKOHARJO

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN YANG MENYIAPKAN SURAT PERINTAH  
 MEMBAYAR GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	GAJI SKPD	PEJABAT YANG MENYIAPKAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Perencana Pembangunan Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Dinas Perhubungan
7	Badan Lingkungan Hidup	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Sosial	Dinas Sosial



NO	GAJI SKPD	PEJABAT YANG MENYIAPKAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Sekretariat Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	Sekretariat DPRD	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
23	Inspektorat	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Inspektorat	Inspektorat
24	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Weru	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Weru	Kecamatan Weru
26	Kecamatan Bulu	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Bulu	Kecamatan Bulu

NO	GAJI SKPD	PEJABAT YANG MENYIAPKAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
27	Kecamatan Tawang Sari	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Tawang Sari	Kecamatan Tawang Sari
28	Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
29	Kecamatan Nguter	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Nguter	Kecamatan Nguter
30	Kecamatan Bendosari	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Bendosari	Kecamatan Bendosari
31	Kecamatan Polokarto	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Polokarto	Kecamatan Polokarto
32	Kecamatan Mojolaban	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Mojolaban	Kecamatan Mojolaban
33	Kecamatan Grogol	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Grogol	Kecamatan Grogol
34	Kecamatan Baki	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Baki	Kecamatan Baki
35	Kecamatan Gatak	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Gatak	Kecamatan Gatak
36	Kecamatan Kartasura	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
37	Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
38	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Kartasura	Kecamatan Kartasura
39	Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Bendosari	Kecamatan Bendosari
40	Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
41	Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
42	Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
43	Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
44	Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo

NO	GAJI SKPD	PEJABAT YANG MENYIAPKAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
45	Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
46	Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
47	Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
48	Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
49	Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
50	Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
51	Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
52	Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
53	Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
54	Badan Ketahanan Pangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
55	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
56	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
57	Dinas Pertanian	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA  
 PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN  
 JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
 KABUPATEN SUKOHARJO

PEJABAT PENANDATANGAN SPM GAJI BULAN JANUARI  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Perencana Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Dinas Perhubungan
7	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
23	Inspektorat	Inspektur	Inspektorat
24	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Weru	Camat Weru	Kecamatan Weru
26	Kecamatan Bulu	Camat Bulu	Kecamatan Bulu
27	Kecamatan Tawang Sari	Camat Tawang Sari	Kecamatan Tawang Sari
28	Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
29	Kecamatan Nguter	Camat Nguter	Kecamatan Nguter
30	Kecamatan Bendosari	Camat Bendosari	Kecamatan Bendosari
31	Kecamatan Polokarto	Camat Polokarto	Kecamatan Polokarto
32	Kecamatan Mojolaban	Camat Mojolaban	Kecamatan Mojolaban
33	Kecamatan Grogol	Camat Grogol	Kecamatan Grogol
34	Kecamatan Baki	Camat Baki	Kecamatan Baki
35	Kecamatan Gatak	Camat Gatak	Kecamatan Gatak
36	Kecamatan Kartasura	Camat Kartasura	Kecamatan Kartasura
37	Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Camat Kartasura	Kecamatan Kartasura
38	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Camat Kartasura	Kecamatan Kartasura

NO	GAJI SKPD	PEJABAT PENANDATANGAN SPM GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
39	Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	Camat Bendosari	Kecamatan Bendosari
40	Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
41	Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
42	Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
43	Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
44	Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
45	Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
46	Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
47	Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
48	Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
49	Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
50	Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
51	Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
52	Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
53	Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo	Camat Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo
54	Badan Ketahanan Pangan	Kepala Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
55	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
56	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
57	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Dan Perikanan
58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN BELANJA  
PEGAWAI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN  
JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017  
KABUPATEN SUKOHARJO

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
GAJI BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	TUGAS
1	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Kuasa BUD	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Bulan Januari Tahun Anggaran 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA